

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2020-2024

Aksi Natal Iman Zega¹, Santing Itidal Dakhi², Maria Anastasia Giawa³, Elfrida Halawa⁴,
Evalina Pakpahan⁵

¹⁻⁶Fakultas Bisnis Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Email Author: aksinatal52@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze regional development inequality in North Sumatra Province during the period 2020–2024. The inequality is measured using indicators such as Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, the Williamson Index, and the distribution of economic sectors across districts and cities. The findings reveal that economic growth in the province is highly concentrated in Medan, Deli Serdang, and Binjai, which together contribute more than 40% of North Sumatra's GRDP. In contrast, peripheral and island regions such as Nias, Mandailing Natal, and Pakpak Bharat continue to face limited infrastructure access, low human resource quality, and dependence on primary sectors with low added value. The COVID-19 pandemic in 2020 exacerbated inequality, as economic recovery occurred more rapidly in urban centers compared to lagging regions. Government efforts through toll road construction, port development, and fiscal transfers have improved connectivity, yet they have not significantly reduced disparities between regions. Consequently, regional development inequality in North Sumatra remains relatively high up to 2024. More aggressive strategies are required to achieve equitable development, including better distribution of investment, strengthening of local leading sectors, and improved access to basic services in underdeveloped areas.

Keywords: Regional inequality, North Sumatra, Williamson Index, GRDP, equitable development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Ketimpangan pembangunan diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Williamson, serta distribusi sektor ekonomi antar kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi cenderung terkonsentrasi di Kota Medan, Deli Serdang, dan Binjai, yang menyumbang lebih dari 40% PDRB Sumatera Utara. Sementara itu, wilayah kepulauan dan pegunungan seperti Nias, Mandailing Natal, dan Pakpak Bharat masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah rendah. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memperburuk ketimpangan, karena pemulihan ekonomi lebih cepat terjadi di pusat-pusat perkotaan dibandingkan daerah tertinggal. Upaya pemerintah melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta dana perimbangan daerah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan konektivitas, namun belum mampu secara signifikan menurunkan disparitas antarwilayah. Dengan demikian, ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara masih relatif tinggi hingga tahun 2024, sehingga diperlukan strategi pemerataan yang lebih agresif melalui distribusi investasi, penguatan sektor unggulan lokal, serta peningkatan akses layanan dasar di daerah tertinggal.

Kata kunci: Ketimpangan pembangunan, Sumatera Utara, Indeks Williamson, PDRB, pemerataan wilayah

PENDAHULUAN

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kuncoro, 2006). Dalam praktik pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi

yang pesat justru kerap diikuti oleh meningkatnya kesenjangan pembangunan antarwilayah (Smith, 2004).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang tersedia, serta membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi regional. Pada hakikatnya, tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan sering muncul sebagai persoalan krusial yang, apabila tidak ditangani secara tepat, berpotensi memicu permasalahan multidimensional, seperti tekanan demografis, ketidakstabilan ekonomi, konflik sosial, dinamika politik, hingga kerusakan lingkungan. Dalam skala makro, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah (Adhiani, 2008).

Ketimpangan pembangunan umumnya tercermin dalam perbedaan tingkat pendapatan dan ketimpangan spasial antarwilayah. Pendekatan pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi terhadap semakin lebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah (Apriyanto, 2024). Stewart, Langer, dan Venugopal (2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan pembangunan antarwilayah sering menjadi pemicu konflik sosial serta tuntutan keadilan dari daerah yang tertinggal. Sejalan dengan itu, Chakravarty (2015) menegaskan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dapat mendorong terjadinya polarisasi dan konflik sosial. Dalam konteks Indonesia, Akita dan Kataoka (2022) menemukan bahwa disparitas pembangunan regional tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas sosial dan politik. Kanbur dan Venables (2005) turut menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan faktor penting dalam mencegah munculnya ketegangan antar daerah. Ketimpangan pembangunan dapat dipahami secara vertikal, yaitu ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan, serta secara horizontal, yakni perbedaan tingkat kemajuan antara wilayah yang berkembang dan wilayah yang tertinggal (Sjafrizal, 2008).

Belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Alokasi pengeluaran negara pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan medis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas tersebut selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bertambahnya aktivitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini akan memperkuat proses industrialisasi sehingga wilayah yang sebelumnya tertinggal dapat

berkembang dan pada akhirnya menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan yang ada (Jhingan, 2007).

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih tinggi (Smith, 2015). Tingkat kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, serta indikator sosial lainnya (Nurdianti dkk., 2024). Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kemampuan dan keterampilan penduduk, sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas dan inovasi, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengadopsi dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (Wulandari dkk., 2024).

Tingginya ketimpangan pendapatan umumnya disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor-faktor produksi, khususnya aset modal. Karakteristik masing-masing wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pembangunan ekonomi yang terbentuk. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan ketidaksamaan kemampuan wilayah dalam mencapai pertumbuhan, di mana sebagian daerah berkembang dengan cepat sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Perbedaan laju pertumbuhan ini selanjutnya memicu ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan antarwilayah, termasuk yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Todaro, 2015).

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menimbulkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, yang berdampak langsung pada pola kehidupan masyarakat. Besarnya pendapatan yang diterima setiap kelompok masyarakat di Provinsi Sumatera Utara memengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Perbedaan distribusi pendapatan tersebut menyebabkan variasi tingkat kesejahteraan antar rumah tangga, yang tercermin dari perbedaan pola pengeluaran berdasarkan jenis mata pencaharian. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi pada masyarakat maupun rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara (Putri Jamalika dkk., 2025).

Tabel 1. Produk Domestik Bruto (PDRB) ADHK Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	PDRB
2020	53,374,636
2021	54,765,182
2022	57,352,877
2023	60,223,595
2024	63,253,473

Sumber: BPS Sumatera Utara 2020-2024

Berdasarkan data yang tersedia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 53.374.636 dan selanjutnya mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian serupa yang pernah dilakukan *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Sumatera Utara* oleh Puspita & Imsar (2025) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Sumatera Utara tidak merata; daerah perkotaan seperti Medan, Deli Serdang, dan Binjai tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah pedalaman seperti Nias atau Mandailing Natal, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah tetap terjadi meskipun PDRB meningkat secara keseluruhan.

Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan data PDRB di atas adalah fokus analisisnya: data PDRB hanya menunjukkan tren agregat pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi tanpa merinci variabilitas pertumbuhan di level kabupaten/kota dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan. Sementara itu, penelitian Puspita & Imsar membahas ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di dalam provinsi itu sendiri, sehingga menunjukkan bahwa meskipun angka PDRB meningkat, tidak semua wilayah mendapatkan manfaat pertumbuhan secara merata.

Penelitian ini penting dilakukan karena peningkatan PDRB yang terjadi tidak otomatis berarti pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah dapat menimbulkan masalah sosial-ekonomi seperti disparitas pendapatan, kesenjangan pelayanan publik, dan perbedaan kesempatan kerja yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat di wilayah paling tertinggal. Dengan memahami pola pertumbuhan dan distribusi manfaatnya, kebijakan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika PDRB di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 hingga 2024 serta mengkaji sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut berkontribusi pada pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di dalam provinsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika aktivitas perekonomian suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat selama periode tertentu. Sukirno (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya

kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Prasetyo (2009) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi secara sederhana sebagai peningkatan output atau pendapatan nasional secara agregat dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila nilai riil balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Konsep pembangunan ekonomi sering dirangkum dalam ungkapan “economic development is growth plus change”, yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan, tetapi juga disertai dengan perubahan struktural dan pola kegiatan ekonomi (Sukirno, 1994).

Simon Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Sukirno (1995), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa ekonomi bagi penduduknya. Peningkatan kemampuan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang diperlukan untuk mendukung proses pertumbuhan. Permasalahan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan isu makroekonomi jangka panjang, karena berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk terus meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu.

Peningkatan kapasitas produksi tersebut didorong oleh bertambahnya faktor-faktor produksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Investasi berperan dalam menambah stok barang modal, sementara perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi produksi. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah tenaga kerja akibat penambahan penduduk, serta peningkatan keterampilan melalui pengalaman kerja dan pendidikan, turut memperkuat kemampuan ekonomi suatu negara.

Menurut Jhingan (1994), pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan pendapatan riil per kapita yang dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, serta melalui adanya perubahan-perubahan yang mampu meningkatkan sumber daya produktif dan pada akhirnya menaikkan pendapatan riil per kapita. Definisi ini mencakup beberapa unsur penting, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan persediaan barang secara berkelanjutan; dan kedua, kemajuan teknologi menjadi faktor kunci yang menentukan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan beragam barang dan jasa bagi masyarakat.

Pengertian Ketimpangan

Kuncoro (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan relatif yang dialami oleh masyarakat. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi tingkat pembangunan antarwilayah, sehingga memunculkan kesenjangan atau disparitas kesejahteraan di berbagai daerah (Sukirno, 2010).

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Kesenjangan tersebut timbul akibat perbedaan potensi sumber daya alam serta karakteristik demografi yang dimiliki masing-masing wilayah, sehingga kapasitas daerah dalam menjalankan proses pembangunan menjadi tidak seragam. Kondisi ini menyebabkan adanya wilayah yang berkembang lebih cepat dan wilayah yang tertinggal. Ketimpangan antarwilayah juga berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya memengaruhi arah dan perumusan kebijakan pembangunan wilayah oleh pemerintah (Sjafrizal, 1997).

Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan hipotesis Neo-Klasik, pada tahap awal pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini berlangsung hingga mencapai titik tertinggi tertentu. Seiring dengan berlanjutnya proses pembangunan dan meningkatnya tingkat kematangan ekonomi, kesenjangan antarwilayah tersebut secara bertahap akan mengalami penurunan (Sjafrizal, 2008).

Dalam praktiknya, ketimpangan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam proses pembangunan daerah. Keberadaan ketimpangan dapat menjadi pemicu bagi wilayah yang tertinggal untuk berupaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya agar tidak semakin tertinggal dari daerah lain. Selain itu, persaingan antarwilayah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga dapat mendorong terjadinya perbaikan pembangunan, sehingga dalam batas tertentu ketimpangan dapat memberikan dampak yang bersifat positif. Namun demikian, ketimpangan yang semakin tinggi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya efisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas dan solidaritas sosial, serta munculnya persepsi ketidakadilan dalam masyarakat (Todaro, 2004).

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah domestik dalam periode waktu tertentu.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk memiliki peran ganda dalam proses pembangunan, baik sebagai faktor pendorong maupun sebagai faktor penghambat. Di satu sisi, populasi yang besar dapat menjadi potensi karena menyediakan tenaga kerja yang melimpah untuk mendukung kegiatan pembangunan. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi kendala apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, karena berpotensi meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh pemerintah.

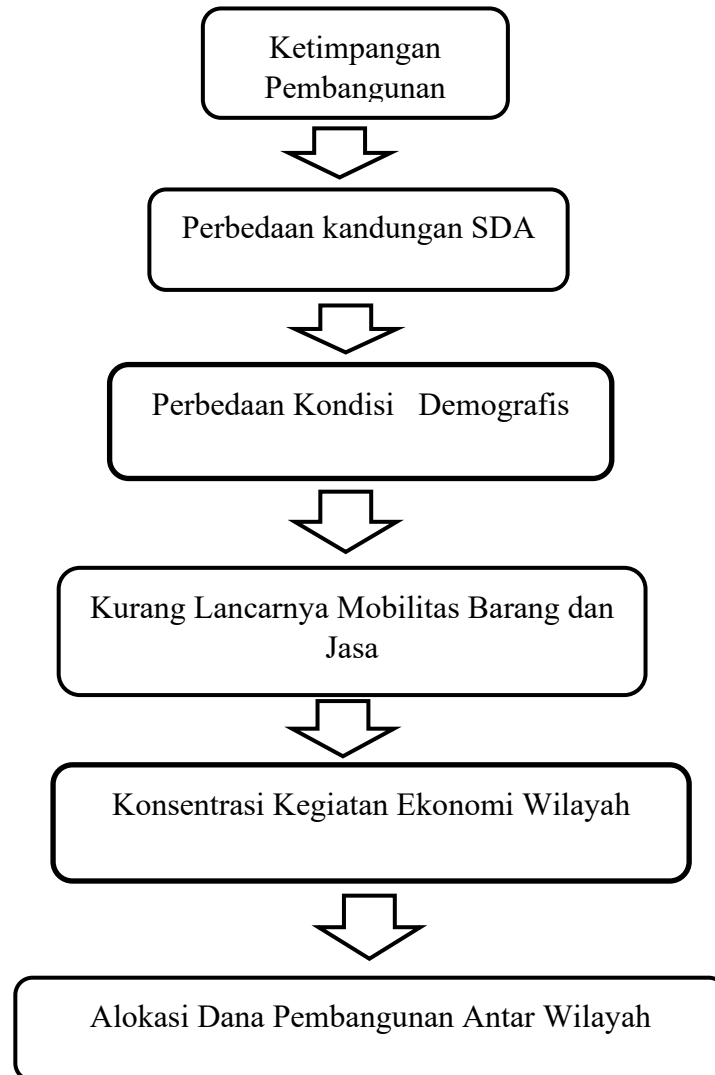
Hubungan Antara PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1997). Todaro (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak negatif terhadap pemerataan pendapatan. Dalam pandangannya, Todaro menekankan pentingnya karakteristik pertumbuhan ekonomi, yang mencakup cara pertumbuhan tersebut dicapai, pihak-pihak yang terlibat, sektor-sektor yang diprioritaskan, serta peran lembaga-lembaga yang merancang dan mengelola proses pertumbuhan tersebut.

Karakteristik pertumbuhan ekonomi inilah yang menentukan apakah peningkatan ekonomi mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis diikuti oleh distribusi manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hipotesis Neo-Klasik, pendapatan per kapita yang direpresentasikan oleh PDRB per kapita dapat digunakan sebagai variabel independen untuk menggambarkan tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah (Sjafrizal, 2008).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Wilayah yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Namun demikian, permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi bukan hanya terletak pada besarnya pertumbuhan, melainkan pada sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Apabila peningkatan pendapatan per kapita tersebut berlangsung secara merata, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat ketimpangan dapat ditekan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Berpikir Ilmiah

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian berlangsung mulai tanggal 10 November 2025 hingga selesai.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan sumber sekunder melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mencatat data yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku dan jurnal.

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan, sehingga tidak memerlukan teknik sampling maupun kuesioner. Periode data yang digunakan mencakup tahun 2020 hingga 2024, dengan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis Data

Ketimpangan ekonomi antarwilayah menggambarkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di suatu daerah. Untuk mengukur tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus dari Indeks Williamson. Beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antara lain perbedaan potensi sumber daya alam, variasi kondisi demografis, keterbatasan mobilitas barang dan jasa, konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, serta alokasi dana pembangunan yang tidak merata antarwilayah.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n ((y_i - y)^2 \cdot \frac{P_i}{P})}}{y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita Provinsi

y = PDRB per kapita Indonesia

P_i = jumlah penduduk Provinsi

P = jumlah penduduk Indonesia

Semakin kecil nilai Indeks Williamson atau mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan semakin berkurang, atau dengan kata lain distribusinya semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh nilai indeks dari nol, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi. Nilai pengukuran Indeks Williamson berkisar antara 0 hingga 1, atau secara matematis dinyatakan sebagai $0 < VW < 1$.

Indeks Williamson dipilih karena paling sesuai untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah berbasis PDRB per kapita dan jumlah penduduk, serta mampu menggambarkan disparitas ekonomi regional secara lebih akurat dibandingkan Indeks Gini yang berfokus pada ketimpangan individu atau ukuran lain yang lebih kompleks seperti Theil Index.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah penelitian

Secara geografis, wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara berada pada koordinat 1°–4° Lintang Utara dan 98°–100° Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Aceh di bagian utara, Selat Malaka di bagian timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di bagian selatan, serta Samudera Hindia di bagian barat. Provinsi ini merupakan provinsi daratan utama di Pulau Sumatera dengan sebagian wilayah kepulauan kecil di barat dan timur. Provinsi yang beribukota di Kota Medan ini terdiri dari 33 kabupaten/kota (25 kabupaten dan 8 kota) dengan luas wilayah 72.981,23 km². Jumlah populasi pada tahun 2024 mencapai sekitar 15,58 juta jiwa (sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024).

Kondisi Kependudukan

Provinsi Sumatera Utara memiliki total jumlah penduduk yang terus meningkat selama periode 2020–2024. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 dan proyeksi serta data administrasi terkini, jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai sekitar 14,8 juta jiwa, meningkat menjadi sekitar 15,47 juta jiwa pada pertengahan 2024 (sumber: BPS dan Dukcapil Kemendagri, 2024). Proyeksi menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara. dan data 2020–2024 rata-rata sekitar 1,28 persen per tahun, dengan variasi antar kabupaten/kota (tertinggi di wilayah urban seperti sekitar Medan dan Deli Serdang akibat migrasi, serta terendah di kabupaten pegunungan atau kepulauan kecil). Rasio jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020–2024 sekitar 101 (artinya di antara 100 orang wanita terdapat sekitar 101 orang laki-laki). Rasio tertinggi biasanya terjadi di kabupaten dengan aktivitas industri atau migrasi tenaga kerja laki-laki dominan (seperti Deli Serdang atau Langkat), sedangkan yang terendah di daerah dengan pola migrasi berbeda. Dari total penduduk dibagi dengan total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sebesar (72.981,23 km²), didapatkan angka kepadatan penduduk sekitar 212 per km² pada tahun 2024. Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kota Medan mencapai lebih dari 8.000 per km² (dengan luas sekitar 265 km² dan penduduk 2,54 juta jiwa), Kota ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, sebagian besar

penduduk provinsi berada pada kelompok usia produktif. (15–64 tahun), namun kelompok umur muda seperti 0–4 tahun masih signifikan dengan jumlah sekitar 1,2–1,3 juta orang pada periode terkini (proyeksi 2023–2024), dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari pada perempuan.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	14.799,4
2021	14,936,2
2022	15.115,2
2023	15.386,6
2024	15.588,5

Sumber: BPS Sumatera Utara 2020-2024

Tabel tersebut menggambarkan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. terus mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebesar 14.799,4 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 14.936,2 ribu jiwa pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk ini berlanjut pada tahun 2022 sebesar 15.115,2 ribu jiwa, tahun 2023 sebesar 15.386,6 ribu jiwa, hingga mencapai 15.588,5 ribu jiwa pada tahun 2024.

Kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang stabil, yang dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan alami (kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan kematian) serta arus migrasi masuk ke Provinsi Sumatera Utara.

PDRB Perkapita

Berdasarkan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara, terlihat bahwa PDRB per kapita di provinsi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. PDRB Per Kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2020–2024

Tahun	PDRB Perkapita SUMUT
2020	36.175,16
2021	36.582,07
2022	37.780,55
2023	39.140,19
2024	40.576,95

Sumber: BPS SumateraUtara 2020-2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 36.175,16, kemudian meningkat menjadi 36.582,07 pada tahun 2021. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 sebesar 37.780,55, tahun 2023 sebesar 39.140,19, hingga mencapai 40.576,95 pada tahun 2024.

Analisis Disparitas Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara relatif rendah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah cenderung merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1, menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi tidak merata.

Tabel 4 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Williamson
2020	0,02
2021	0,02
2022	0,02
2023	0,02
2024	0,02

Sumber: BPS Sumut 2020-2024 diolah

Berdasarkan tabel Indeks Williamson periode 2020–2024, terlihat bahwa nilai Indeks Williamson berada pada angka 0,02 dan tidak mengalami perubahan selama lima tahun berturut-turut. Nilai yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah tergolong sangat kecil, sehingga distribusi pendapatan atau aktivitas ekonomi antarwilayah relatif merata. Konsistensi nilai Indeks Williamson tersebut juga mengindikasikan bahwa selama periode penelitian tidak terjadi pergeseran signifikan dalam struktur pembangunan wilayah, baik berupa peningkatan maupun penurunan ketimpangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pemerataan pembangunan antarwilayah pada periode 2020–2024 berada dalam keadaan stabil dan terkendali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara sama-sama mengalami peningkatan selama periode penelitian. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tetap berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan adanya perbaikan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan ketimpangan antarwilayah. Nilai Indeks Williamson yang berada pada kategori rendah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi relatif tersebar dan tidak hanya terpusat di daerah tertentu. Artinya, meskipun terdapat perbedaan tingkat perkembangan antar kabupaten/kota, kesenjangan masih dalam batas yang wajar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara cenderung berjalan dengan pola yang cukup merata, meskipun tetap diperlukan kebijakan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah.

KESIMPULAN

Selama 2020–2024, perekonomian Provinsi Sumatera Utara cenderung membaik yang terlihat dari kenaikan PDRB dan PDRB per kapita setiap tahun. Perhitungan Indeks Williamson menunjukkan nilai 0,02 yang konstan sepanjang periode tersebut, sehingga ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota tergolong sangat rendah dan relatif stabil. Namun, secara struktural aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Kota Medan dan sekitarnya, sementara wilayah kepulauan dan pegunungan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM. Karena itu, meskipun ketimpangan statistik rendah, pemerataan kesejahteraan dan kualitas pembangunan tetap perlu diperkuat.

Pemerintah provinsi perlu memprioritaskan percepatan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, mendorong pemerataan investasi melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memperkuat peningkatan kualitas SDM (pendidikan, pelatihan, kesehatan) terutama di daerah ber-PDRB per kapita rendah. Penelitian selanjutnya disarankan menambah indikator ketimpangan (misalnya Indeks Gini/pendekatan spasial) dan memperpanjang periode analisis agar gambaran ketimpangan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiani. (2008). *Pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya*.
- Akita, T., & Kataoka, M. (2022). Regional income inequality and development disparities in Indonesia. *Journal of Asian Economics*.
- Apriyanto. (2024). Ketimpangan sosial-ekonomi dan pembangunan wilayah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*.
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Chakravarty, S. R. (2015). *Inequality, polarization and poverty: Advances in distributional analysis*. Springer.
- Jhingan, M. L. (1994). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jhingan, M. L. (2007). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.



- Kanbur, R., & Venables, A. J. (2005). *Spatial inequality and development*. Oxford University Press.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurdianti, dkk. (2024). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Regional*.
- Prasetyo. (2009). *Ekonomi pembangunan*.
- Puspita, R., & Imsar. (2025). Analisis pertumbuhan ekonomi regional dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*.
- Sjafrizal. (1997). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia bagian barat. *Prisma*.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Stewart, F., Langer, A., & Venugopal, R. (2012). Horizontal inequalities and conflict: Understanding group violence in multiethnic societies. *Palgrave Macmillan*.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar teori makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1995). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi teori pengantar* (edisi ketiga). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. (2004). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Wulandari, dkk. (2024). Pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.